

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, suatu negara harus melakukan proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi ini, tidak terlepas dari masalah pertumbuhan ekonomi. Perubahan dari nilai Produk Domestik Bruto dianggap bisa mencerminkan pertumbuhan ekonomi. *Produk Domestik Bruto* dibedakan berdasarkan harga berlaku (*Produk Domestik Bruto nominal*) dan berdasarkan harga konstan (*Produk Domestik Bruto riil*). Para ekonom sepakat bahwa PDB riil atau PDB berdasarkan harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi lebih baik. Untuk pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi/kota/kabupaten dapat dilihat dari PDRB.

Ekonomi memiliki nilai yang sangat penting guna menjaga kestabilan kehidupan suatu negara atau daerah. Pada dewasa ini, banyak sektor-sektor perekonomian yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik formal maupun informal yang akan mendukung pelaksanaan program pembangunan dengan salah satu tujuan yaitu meningkatkan dan menyetarakan taraf hidup masyarakat. Pengertian pembangunan ekonomi menurut Todaro (2006) adalah suatu tahap yang bersifat multidimensional yang akan merubah struktur ekonomi dan merubah keadaan sosial menjadi lebih baik, mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, mengurangi disparitas serta mengurangi pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ketika mengambil suatu keputusan dan kebijakan selalu merujuk kepada perubahan sosial dan budaya yang diayomi dengan kekuatan ekonomi dan politik guna untuk membangun daerah.

Dalam memberlakukan suatu kebijakan diperlukannya transformasi pembangunan daerah guna untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan meningkatkan perekonomian.

Salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena perubahan kondisi ekonomi secara terus-menerus menuju arah lebih baik yang menandakan berhasilnya pemerintah membangun daerah tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari upaya pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diraih dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Sukirno (2006), akibat semakin majunya aktivitas perekonomian adalah bertambahnya produksi barang dan jasa serta peningkatan usaha untuk memakmurkan masyarakat. Dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam perekonomian, dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai pedoman atau acuan perencanaan bagi negara atau daerah untuk masa yang akan datang. Menurut Amir (2007), pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dikatakan mengalami perkembangan yang baik apabila terjadinya peningkatan berbagai sektor perekonomian yang mendukung perekonomian. Andaikata perkembangan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak baik, akibat yang akan terjadi adalah permasalahan sosial ekonomi yang semakin sulit diatasi.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di Sumatera Barat, peran dari pemerintah sangat diperlukan. Berbagai kebijakan dibuat guna untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan produk domestik regional bruto

kabupaten atau kota dapat menjadi landasan untuk melihat perekonomian suatu daerah tersebut.

Tabel 1.1

**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan
kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2017(juta rupiah)**

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017	Total
KepulauanMentawai	121.954	124.472	122.826	124.571	133.731	627.554
Pesisir Selatan	389.522	405.568	423.678	416.276	446.364	2.081.407
Kab.Solok	385.986	419.555	417.086	429.072	454.000	2.105.698
Sijunjung	285.855	297.483	298.359	291.264	307.228	1.480.189
Tanah Datar	394.689	413.300	402.320	400.185	428.187	2.308.681
Padang Pariaman	575.018	595.418	641.187	611.589	653.547	3.076.759
Agam	617.791	631.277	623.478	644.824	681.858	3.199.228
Lima Puluh Kota	477.875	487.911	484.560	485.724	512.850	2.448.920
Pasaman	250.636	267.860	257.834	257.583	272.182	1.306.095
Solok Selatan	169.111	172.938	165.859	167.390	176.943	852.241
Dharmasraya	334.701	346.837	335.018	333.536	353.709	1.703.800
Pasaman Barat	502.443	504.619	504.297	498.803	527.173	2.537.335
Padang	1.938.813	2.007.449	2.118.602	2.188.268	2.327.326	10.580.458
Kota Solok	124.190	123.469	129.885	132.946	140.993	651.481
Sawahlunto	115.228	121.791	128.136	128.988	136.935	631.078
Padang Panjang	108.907	111.821	115.244	119.903	126.965	582.840
Bukittinggi	255.406	268.055	281.776	295.021	314.323	1.414.580
Payakumbuh	193.261	203.260	207.063	216.241	230.472	1.050.298
Pariaman	147.855	154.836	158.789	162.086	172.121	795.687
SUMBAR	7.216.209	7.400.202	7.378.637	7.414.769	7.829.741	37.239.560

Sumber: BPS Sumatera Barat

Pada Tabel 1.1 memperlihatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2013-2017. Secara umum dilihat dari pertumbuhan PDRB Sumatera Barat mengalami peningkatan walau menurun pada tahun 2015. Penyebab terjadi penurunan karena berkurangnya kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap pembentukan PDRB. Dapat diketahui dari tabel bahwa, pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB di Sumatera Barat berhasil tumbuh sebesar 7,2 triliun rupiah dari tahun sebelumnya, lalu terjadi kenaikan di

tahun 2014 menjadi 7,4 triliun rupiah dan pada tahun 2015 pertumbuhan pdrb turun menjadi 7,3 triliun rupiah lalu meningkat kembali untuk tahun 2016 dan 2017. Selama lima tahun jumlah peningkatan PDRB Sumatera Barat sebesar 37 Triliun Rupiah.

Namun disamping itu, terdapat perbedaan peningkatan PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat. Rata-rata pertumbuhan PDRB setiap tahunnya cenderung berfluktuasi. Hanya pada daerah perkotaan saja yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk daerah kabupaten terjadi fluktuasi. Daerah yang mengalami pertumbuhan PDRB paling tinggi yaitu Kota Padang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman. Kota Padang mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 1,9 triliun, 2 triliun, 2,11 triliun, 2,18 triliun dan 2,3 triliun dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 2,9 triliun dimana merupakan rata-rata pertumbuhan tertinggi. Diikuti oleh Kabupaten Agam dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 639 milyar, kemudian kabupaten Padang Pariaman yang memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 615 milyar. Sedangkan daerah yang mengalami pertumbuhan yang rendah Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok.

Penyebab adanya perbedaan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tiap wilayah yaitu karena setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda, keadaan wilayah serta sasaran kebijakan pembangunan yang tidak sama. Para pakar ekonomi mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan kinerja pembangunan daerah itu sendiri. Pemerintah suatu wilayah baik negara, provinsi, kota dan kabupaten perlu bersinergi guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain berguna

untuk mengukur kinerja pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dijadikan suatu indikator guna penyusunan rencana pembangunan yang berkaitan dengan upaya penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi, peningkatan perdagangan yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial.

Dewasa ini, pada masa otonomi daerah mewajibkan pemerintah suatu daerah agar mampu memaknai pembangunan ekonomi yang sesungguhnya. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa daerah harus mempunyai inovasi yang akan menjadi solusi sehingga pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah dapat dimaknai dengan sebaik-baiknya. Otonomi daerah yaitu pemerintah pusat memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola perekonomiannya. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir direvisi kembali dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana daerah diberi amanah dan tanggung jawab yang besar untuk mengurus daerahnya sendiri mengurangi campur tangan dari pemerintah pusat baik yang terkait dengan pembiayaan maupun terkait kemampuan daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan menetapkan tujuan pembangunan di daerahnya masing-masing sehingga mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam mengelola keuangan dan anggaran daerah, pemerintah harus bekerja dengan baik dan hati-hati. Anggaran daerah diibaratkan sebagai sebuah alat perencanaan dan alat pengawasan mengenai pengeluaran dan penerimaan dimasa depan. Anggaran daerah baik pendapatan maupun belanja daerah menjadi bagian

yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan PDRB.

Pemerintah memiliki dua kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang menyangkut jumlah uang beredar di masyarakat. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuannya untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi, Sukirno (2006). Dalam kebijakan fiskal, alokasi belanja negara merupakan hasil dari penerimaan negara yang dilakukan pemerintah baik dari pajak maupun bukan pajak. Pada kebijakan fiskal terdapat dua pendekatan yang dicetuskan oleh Keynes yang terdiri dari income approach (melalui pajak) dan expenditure approach (melalui pengeluaran). Menurutnya, dengan adanya penurunan pajak atau adanya peningkatan pengeluaran maka ekonomi akan tumbuh dengan baik sehingga tujuan dari kebijakan fiskal yaitu menstabilkan harga, meningkatkan output, memperluas lapangan kerja bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, Mankiw 2013:328 (dalam Merlin Anggraeni, 2017). Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian sangat diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar modal bisa digunakan secara bijak dan tepat sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menunjang perekonomian.

Menurut Budiono (1992) pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran dalam bentuk investasi pemerintah yang diperoleh dari belanja pembangunan/belanja modal dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang diperoleh dari belanja rutin/belanja operasi. Belanja modal adalah belanja yang mencerminkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Anggaran belanja modal

memegang peranan penting dalam perekonomian. Sedangkan belanja operasi yaitu belanja yang menggambarkan konsumsi pemerintah. Klasifikasi belanja operasi yaitu belanja untuk pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, belanja untuk subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan dan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Menurut Wibisono (2003), semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya adalah dengan merealisasikan anggaran belanja dengan tepat baik pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan ataupun untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah.



Tabel 1.2
Belanja Operasi dan Belanja Modal Riil kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat 2015-2017 (juta rupiah)

Wilayah	BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Kab. Mentawai	430	337	467	183	195	210
Kab. Pesisir Selatan	827	1.065	865	212	207	207
Kab. Solok	692	869	729	128	158	164
Kab. Sijunjung	505	697	543	134	192	186
Kab. Tanah Datar	778	925	771	125	146	150
Kab. Padang Pariaman	902	903	760	146	204	236
Kab. Agam	846	1.015	818	169	175	196
Kab. Limapuluh Kota	717	444	395	185	192	282
Kab. Pasaman	530	405	568	126	150	128
Kab. Solok Selatan	375	480	427	123	175	187
Kab. Dharmasraya	424	423	460	172	204	300
Kab. Pasaman Barat	572	524	635	161	194	206
Kota Padang	1.295	1.490	1.237	281	309	321
Kota Solok	296	332	303	122	102	129
Kota Sawahlunto	313	396	360	192	118	126
Kota Padang Panjang	310	433	303	90	116	162
Kota Bukit Tinggi	403	493	349	70	85	87
Kota Payakumbuh	402	419	359	62	117	123
Kota Pariaman	321	472	360	104	135	136
Total	10.883	12.122	10.780	2.785	3.175	3.535

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia, Data Diolah

Pada tabel 1.2 memperlihatkan belanja operasi dan belanja modal riil kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2015-2017. Terlihat bahwa belanja operasi lebih besar daripada belanja modal hal ini terjadi karena salah satu bagian belanja operasi yaitu belanja pegawai yang alokasinya sangat besar yang diperuntukan untuk membayar gaji atau tunjangan pegawai negeri ataupun anggota DPRD. Untuk tingkat kota, pada tahun 2017 belanja operasi tertinggi dipegang oleh Kota Padang dengan besarnya mencapai 1,2 triliun sedangkan jika dilihat dari yang

terendah diduduki oleh Kota Solok dan Kota Padang Panjang yaitu belanja operasinya sebesar 303 milyar rupiah. Belanja modal tertinggi Kota Padang tahun 2017 sebesar 321 milyar merupakan yang tertinggi antara kota lainnya. Sedangkan untuk belanja modal terendah pada tahun 2017 terdapat di Kota Bukittinggi dengan total belanja modal sebesar 87 milyar rupiah. Jika dilihat pada daerah kabupaten belanja operasi terbesar pada tahun 2017 terdapat di kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah belanja operasi sebesar 865 miliar dan yang terendah yaitu kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan untuk belanja modal terbesar di tingkat kabupaten terdapat di kabupaten Dharmasraya dengan besar belanja modal yaitu 303 milyar dan terendah berada di kabupaten Pasaman. Belanja Operasi pada kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2015-2017 berfluktuasi sedangkan realisasi belanja modal secara rata-rata mengalami peningkatan pada dari tahun 2015-2017.

Untuk belanja operasi kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak semua penambahan atau penurunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Berdasarkan data tidak ada satupun wilayah yang belanja operasinya selaras dengan kenaikan pertumbuhan PDRB dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Berbeda halnya dengan belanja modal yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya terdapat 6 daerah yang fluktuatif atau tidak selaras dengan pertumbuhan PDRB selama periode tersebut, yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Sawahlunto.

Selain pengeluaran pemerintah, masalah kependudukan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi oleh pemerintah. Menurut BPS, penduduk adalah

semua orang yang telah berdomisili selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan banyaknya penduduk namun juga dapat menghalangi peningkatan perekonomian. Oleh karena itu, sangat beartinya kedudukan penduduk dalam pembangunan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi sendiri tidak dapat dipisahkan dengan jumlah penduduk. Peningkatan dalam jumlah penduduk dapat mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, serta lapangan pekerjaan yang akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Di Sumatera Barat masalah penduduk merupakan masalah yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Pada 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat terjadi penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Dengan penambahan jumlah penduduk setiap tahun akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah bagaimana mencari cara untuk mengendalikan jumlah penduduk sehingga bisa berpengaruh untuk ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat. Penduduk menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian yang akan menyebabkan PDRB meningkat. Selain itu yang tidak kalah penting adalah adanya kebijakan dalam perluasan kesempatan kerja guna mencapai kesejahteraan.

Dengan keadaan diatas dan banyaknya studi empiris mengenai pembahasan yang sama pada daerah lain dimana hasilnya berbeda-beda (research gap), melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai sejauh apa pengaruh belanja modal, belanja operasi dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Belanja Modal, Belanja Operasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sumatera Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam proses pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan sebagaimana yang direncanakan terutama terkait dengan upaya-upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Permasalahan perekonomian yang dialami banyak daerah tidak terkecuali Sumatera Barat adalah masalah yang sudah lama dan harus diatasi oleh pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan keuangan daerah secara bijak. Studi tentang arah hubungan belanja pemerintah dan masalah demografi terutama jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang tidak sama. Dapat diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh Taufan Harry Prasetyo dan Eny Sulistyaningrum (2008) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dalam (Prima) belanja pemerintah menunjukkan hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh Ichwan (2017) memberikan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dilain sisi penelitian yang dilakukan oleh Ardyan (2012) menjelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, menyatakan bahwa pertumbuhan PDRB Sumatera Barat dimulai tahun 2015 sampai 2018 tidak lagi menempati sebagai rangking pertama di kawasan Sumatera, bahkan di tahun 2017 hanya bisa

menginjaki peringkat kelima dari 10 provinsi di Sumatera. Pengeluaran pemerintah dari belanja modal dan belanja operasi yang cukup besar seharusnya bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga persoalan jumlah penduduk yang kian bertambah setiap tahunnya menjadi tantangan untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat agar mampu menyediakan kebutuhan yang lebih banyak bagi masyarakat daerahnya sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa mengatur dan menggunakan keuangan dengan bijak dan tepat sasaran serta memanfaatkan jumlah penduduk yang banyak guna mendorong perekonomian karena manfaat yang didapatkan bisa positif maupun negatif tergantung kepada keadaan daerah dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan pembahasan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat

2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Menambah, menyempurnakan, melengkapi sekaligus sebagai acuan dan penambah informasi hasil-hasil penelitian yang akan datang dengan topik yang sama.
2. Menjadi sumbangan pemikiran dan bacaan untuk bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun dari fakultas diluar ekonomi.
3. Sebagai bahan referensi untuk pemerintah daerah sehingga dapat membuat kebijakan yang lebih baik mengenai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
4. Bagi penulis agar menjadi bahan penambah ilmu dan wawasan mengenai pengaruh belanja modal, belanja operasi dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Sumatera Barat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka ditentukan ruang lingkup yang akan dibahas diharapkan tidak keluar dari topik yang akan dibahas. Fokus penelitian ini dititik beratkan kepada pengaruh pengeluaran pemerintah belanja modal, pengeluaran pemerintah belanja operasi dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup yang akan dibahas, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Literatur

Bab ini berisi dasar teori dan literatur yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dari belanja modal maupun belanja operasi serta jumlah penduduk dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini memuat jenis dan sumber data uraian dari variabel jenis dan sumber data penelitian, metode dan model yang digunakan, serta langkah-langkah untuk memilih model penelitian yang tepat.

BAB IV : Gambaran Umum Daerah Penelitian

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan geografis daerah, pertumbuhan PDRB, belanja modal, belanja operasi serta jumlah penduduk.

BAB V : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasannya

BAB VI : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian.

